

VISI DAN MISI DP3ACSKB

A. Visi, Misi dan Program Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi pembangunan dalam RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005-2025 adalah “Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan 2025”, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

- 1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari.
- 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
- 3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.
- 4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Visi Gubenur dan Wakil Gubenur periode 2017-2022 adalah **“BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI, AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI”**, dengan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yaitu:

- Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
- Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal
- Meningkatkan kesehatan masyarakat
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
- Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Dari 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada misi ke-3 (tiga), **“Meningkatkan SDM YANG UNGGUL DAN HANDAL”** dengan tujuan :

- 1. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dengan sasaran :
“Meningkatnyanya Keadilan dan kesetaraan Gender di segala Aspek Pembangunan”
- 2. Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat
 - 1. Meningkatnya Kesejahteraan dan partisipasi Anak dalam pembangunan
 - 2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DP3ACSKB

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan secara struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membawahkan :

- Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak;
 3. Seksi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak.
- Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 1. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Peserta KB;
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Fasilitas Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Fasilitas Pencatatan Sipil;
 3. Seksi Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana); dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN DP3ACSKB

B. Tujuan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan Sasaran Meningkatnya nilai capaian LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, dengan indikator tujuan sebagai berikut :
“Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)”
Dengan Sasaran :
 - a. Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga;
 - b. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG
 - c. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan
 - d. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.
3. Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan indikator :
“Persentase kab/kota Layak Anak”
Dengan sasaran “Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak.”
4. Meningkatnya peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan indicator
 1. Jumlah Kampung KB Cikar yang terbentuk
 2. persentase Pertumbuhan kampung KBSasarannya adalah “Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas”
5. Meningkatkan daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 1. Persentase Database/Profil Kependudukan yang dimanfaatkan
 2. Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen KependudukanDan sasarannya adalah “Meningkatnya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan.”

C. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator kinerja DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pada tabel berikut :

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan	Meningkatnya nilai capaian LAKIP	Status penilaian kinerja
2.	Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga	Persentase peran aktif perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga
		Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan PPRG	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan	Persentase Penanganan Kasus perempuan yang mengalami tindak Kekerasan
		Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan	Persentase Penanganan Kasus anak yang mengalami tindak Kekerasan
		MeningkatnyaPemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga
3.	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak	Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak	Persentase capaian Tahapan Provinsi layak Anak
4	Meningkatkan peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas	Persentase Tingkat kesertaan ber-KB
			Persentase kampung KB yang terbentuk
5	Meningkatnya pemanfaatan data base kependudukan yang terintegrasi	Meningkatnya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Persentase Database/Profil Kependudukan yang termanfaatkan
			Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan